

## **DISTRIBUSI FAKTOR PRODUKSI: Pemerataan Kesejahteraan Ekonomi melalui Distribusi Faktor Produksi**

**AM. M. Hafidz MS.**

Jurusan Syariah dan Ekonomi Islam STAIN Pekalongan  
Jl. Kusumabangsa No. 9 Pekalongan Jawa Tengah Indonesia

**Abstract:** It is hard to deny that ownership of production factors should be fairly and proportionately distributed. It will enable every economic agent to deliver maximum output and raise their revenue due to their participation in production process. Thus, it requires that distribution is just not dwell on the income distribution but also on the production factors. This paper seeks to describe the theory proposed by Islamic economy in the sake of production factors.

**Kata Kunci:** distribusi; faktor produksi; pemerataan kesejahteraan

### **Pendahuluan**

Keadilan merupakan salah satu *keyword* yang sangat signifikan dalam Ekonomi Islam. Keadilan meniscayakan terpenuhinya hak dan kewajiban setiap individu secara proporsional. Selain itu, keadilan juga merepresentasikan sebuah pola distribusi yang merata sehingga kemakmuran, kesejahteraan dan kemajuan dalam bidang ekonomi tidak hanya dinikmati oleh kelompok masyarakat tertentu saja.

Selama ini, kajian-kajian tentang distribusi umumnya hanya dikaitkan distribusi pendapatan. Misalnya, bagaimana hasil pembangunan dapat dinikmati oleh semua lapisan masyarakat; bagaimana mekanisme untuk membagikan 'kue' pembangunan ekonomi sehingga dapat didistribusikan secara merata. Salah satu kata kunci dalam mekanisme distribusi ini adalah pembagian secara proporsional, sehingga setiap individu memperoleh penghasilan sesuai dengan apa yang ia hasilkan/produksi. Seorang pemilik modal misalkan, akan memperoleh hasil yang lebih besar dari pada buruh yang bekerja di pabriknya. Seorang tuan tanah tentu akan mendapatkan porsi keuntungan yang berlipat ganda dibanding dengan petani yang menggarap sawahnya.

Namun persoalan tidak cukup berhenti disini. Pembagian atau distribusi pendapatan secara proporsional tidak akan merefleksikan sebuah keadilan jika masing-masing individu tidak memperoleh faktor-faktor produksi secara adil. Mengapa? Karena individu yang hanya mempunyai sedikit faktor produksi, misal tanah sepetak dan seekor kerbau untuk membajak sawahnya, maka pendapatan yang ia peroleh juga akan sangat minim. Ia memang mendapat hasil yang 'proporsional' sesuai dengan faktor produksi yang ia miliki. Pada kasus yang lain, karena mekanisme pembagian faktor produksi yang tidak adil, ada individu yang menguasai tanah dan teknologi secara besar-besaran. Ia menguasai produksi mulai dari sektor hulu sampai sektor hilirnya. Berdasar faktor produksi yang ia miliki, ia memperoleh hasil yang 'proporsional' sesuai faktor produksi yang dikuasainya. Akan tetapi, 'proporsional' disini bukanlah cerminan sebuah keadilan. Oleh karenanya, distribusi harus dimulai dari proses produksi. Uraian dalam makalah ini akan mencoba menawarkan bagaimana solusi yang diajukan oleh Ekonomi Islam untuk mengatasi permasalahan di atas.

### **Pembahasan**

Membahas tentang sistem ekonomi maka tidak mungkin dilepaskan dari sistem kepemilikan. Dalam perspektif Ekonomi Islam, setiap individu mempunyai kebebasan untuk mendapatkan sesuatu selama itu tidak dilarang oleh syari'ah. Sebagaimana dalam kaidah ushuliyah disebutkan bahwa "*al-ashlu fi al-mu'amalati al-ibahah illa yadullu ad-dalil 'ala tabrimibi*" (segala sesuatu yang terkait dengan mu'amalat hukumnya boleh kecuali jika ada dalil yang mengharamkannya). Pada sisi yang lain, Ekonomi Islam juga menjamin hak kepemilikan setiap individu, tidak terkecuali kepemilikan terhadap faktor-faktor produksi.

Ekonomi Islam memberikan perhatian yang sangat intens terhadap tegaknya keadilan sebagai sebuah kata kunci dalam mekanisme distribusi. Keadilan tidak saja diimplementasikan pada output atau pendapatan, namun juga keadilan dalam kepemilikan faktor-faktor produksi. Hal ini mutlak untuk diberlakukan karena kepemilikan faktor-faktor produksi akan sangat berpengaruh secara signifikan terhadap pendapatan yang diperoleh setiap individu. Oleh karenanya 'pembagian' faktor produksi tidak kalah pentingnya dengan mekanisme dalam distribusi pendapatan.

Diakuinya dan didistribusikannya faktor-faktor produksi pada setiap individu, juga merfleksikan bahwa efisiensi dalam proses produksi akan tercapai. Mengapa? Karena seluruh komponen dan sumber daya yang ada, baik itu modal, tenaga kerja, teknologi dan organisasi, dapat dimanfaatkan dan digunakan secara optimal. Jika hal ini terjadi maka tidak akan ada 'faktor produksi yang menganggur' karena seluruhnya terlibat dalam proses produksi. Implikasinya adalah setiap individu akan memperoleh pendapatan yang optimal dan merata. Uraian berikut ini akan menjadikan kepemilikan tanah (dalam kapasitasnya sebagai salah satu sumber daya dalam faktor produksi) akan sangat berpengaruh terhadap distribusi pendapatan, kesejahteraan sosial dan pemerataan hasil pertumbuhan ekonomi.

### **Kepemilikan Tanah (Sumber Daya) sebagai Salah Satu Faktor Produksi**

Umumnya, ketika mengkaji tentang proses produksi maka tidak akan terlepas dari faktor-faktor produksi, seperti modal, manusia (tenaga kerja), sumber daya, teknologi, manajemen dan seterusnya. Islam memandang bahwa dari seluruh rangkaian yang disebut sebagai 'faktor' produksi maka keberadaan manusia/tenaga kerja merupakan komponen yang paling penting. Hal ini memang sangat *makes a sense* karena dalam proses produksi, tujuan akhir dari sebuah proses produksi adalah bermuara pada terciptanya harkat dan martabat manusia yang luhur dan mulia.

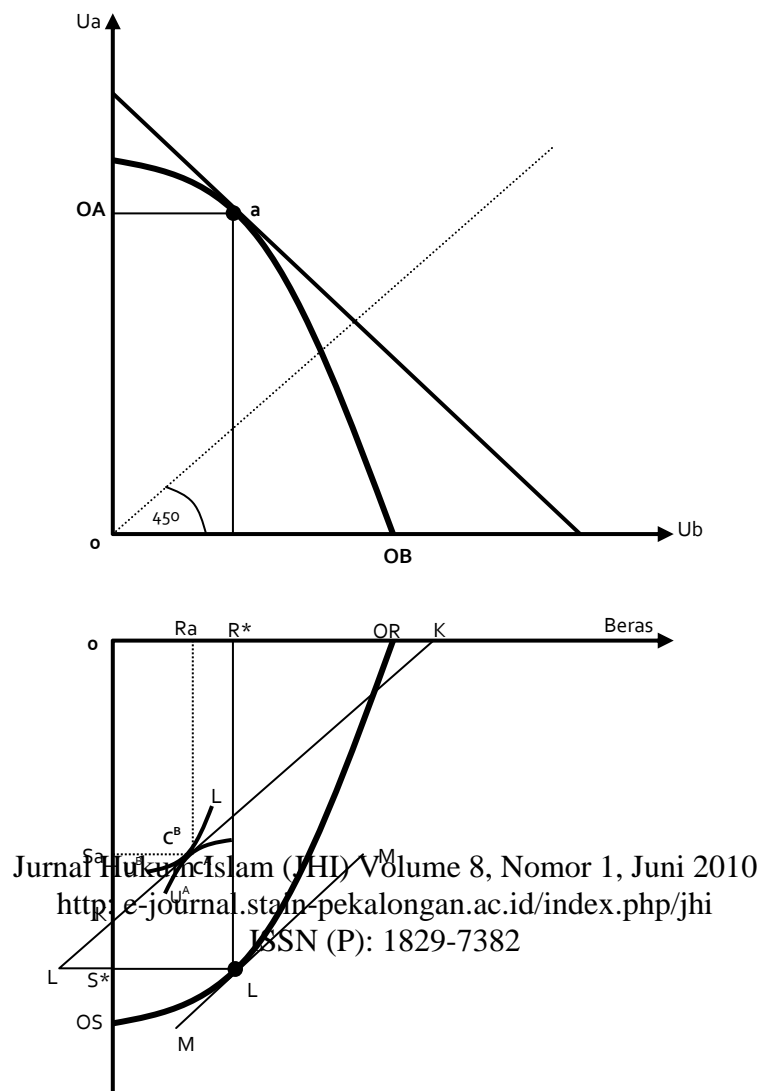
Namun demikian sumber daya alam, dalam hal ini tanah misalnya, juga memainkan peranan yang sangat signifikan dalam menentukan bagaimana proses produksi akan berpengaruh terhadap distribusi pendapatan dan efisiensi alokasi sumber daya. Artinya bahwa distribusi kepemilikan tanah sebagai salah satu faktor produksi akan sangat mempengaruhi:

1. Efisiensi alokasi secara optimal sehingga proses produksi juga semakin efisien;
2. Seluruh komponen masyarakat mempunyai porsi yang signifikan dalam proses produksi;
3. Implikasi dari poin kedua adalah bahwa semua lapisan masyarakat dapat memperoleh kesejahteraan secara bersama-sama, hasil pembangunan dan pertumbuhan ekonomi tidak dimonopoli oleh sekelompok saja.

Sebelum menguraikan lebih lanjut bagaimana hal tersebut di atas dapat dibuktikan, maka akan lebih komprehensif jika dipaparkan terlebih dahulu bahwa sistem ekonomi yang ada selama ini (baik Kapitalisme maupun Sosialisme) mengabaikan distribusi kepemilikan faktor-faktor produksi.

### Kapitalisme Klasik

Sistem ekonomi Kapitalis memang mengakui kepemilikan pribadi secara penuh. Sistem ini juga menekankan adanya kebebasan bagi setiap individu. Namun kebebasan yang muncul bukanlah kebebasan yang sempurna, karena ada individu yang memperoleh kebebasan yang lebih luas dari pada kebebasan yang dimiliki oleh individu yang lainnya. Selain itu, dalam sistem Kapitalis juga terkesan adanya *trade-off* antara pemerataan dan efisiensi alokasi sumber daya guna memaksimalkan output. Gambar 1 di bawah ini menunjukkan kondisi *optimal solution* dalam sistem Kapitalis (Karim, 2002: 183):



Berpijak pada ilustrasi tersebut, diketahui bahwa tanah yang dimiliki oleh A lebih luas jika dibandingkan dengan luas tanah yang dimiliki B. Hal ini memberikan utilitas yang lebih tinggi kepada A dari pada B, oleh karenanya pendapatan yang akan mereka juga tidak akan sama. Permasalahannya adalah, jika pembagian tanah tersebut (antara yang dimiliki A dan B) melalui mekanisme yang dibenarkan oleh hukum maka hal ini tidak menimbulkan ketidakadilan, karena masing-masing pihak telah mendapatkan hak dan kewajibannya secara proporsional. Yang menjadi persoalan adalah jika pembagian tanah di atas melalui mekanisme yang melanggar hukum, misalkan lewat jual-beli *najasy*, pemaksaan perpindahan kepemilikan yang mengatasnamakan kepentingan sosial, dan sebagainya.

Dari gambar di atas juga diketahui bahwa tingkat produksi beras sebesar OR sedangkan produksi gula sebanyak OS. Titik O merupakan titik origins untuk A, dan terlihat A akan memaksimalkan utilitasnya dengan mendorong  $U_a$  sejauh mungkin dari O menuju L. Sedangkan titik origin bagi B adalah L, di mana ia berupa mendorong  $U_b$  dari titik L mendekati titik O.

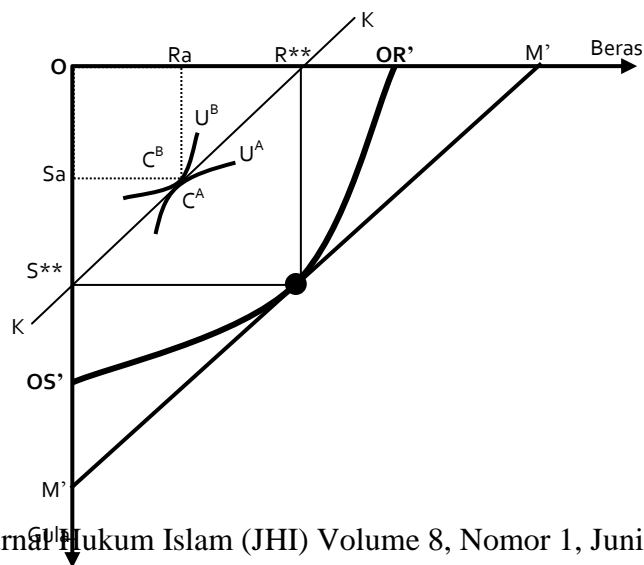
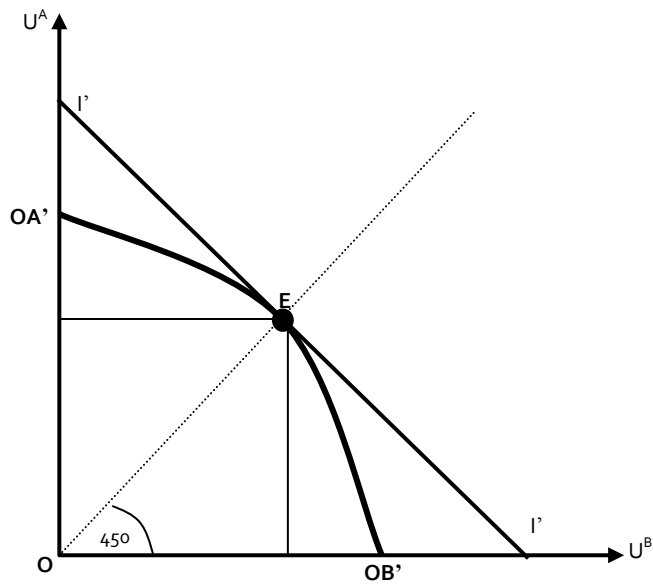
Sedangkan *optimum pareto* terjadi ketika  $U_a$  dan  $U_b$  saling bersinggungan, di mana  $MRS_a = MRS_b$  yang dilukiskan dengan adanya garis harga atau *price line* gabungan dari garis anggaran A dan B sebagaimana yang ditunjukkan oleh garis LKLK. Oleh karenanya garis kemiringan kurva *production possibility frontier* yang ditunjukkan oleh MLM sama dengan kemiringan kurva LKLK. Ketika terjadinya pareto optimal, jumlah barang yang diproduksi sama dengan yang dikonsumsi. Jumlah beras yang diproduksi sebesar OR, dibagi antara A dan B di mana A mendapatkan sebanyak  $OR_a$  sedangkan B memperoleh sebesar  $RaR$ . Adapun gula yang dapat dikonsumsi A sebanyak  $OW_a$ , sedangkan B hanya sebesar  $WaW$ .

Kondisi ini menjadikan adanya *gap* antara pihak yang kaya dan miskin, di mana para pemilik modal (kapitalis) akan semakin mendapatkan keuntungan yang selalu lebih besar dan berlipat ganda dari pada para kaum pekerja. Maka imbasnya adalah pemusatan kesejahteraan hanya bagi golongan tertentu saja (pemilik modal). Hal ini tidak dapat dibenarkan oleh Islam sebagaimana firman Allah bahwa kesejahteraan jangan sampai hanya berputar pada kelompok tertentu (orang kaya) saja:

لكيلادولة بين الأغنياء

### **Sosialisme Klasik**

Sistem pasar Sosialis yang sentralistik dengan kebijakan redistribusi pada titik yang ekstrim, akan berimplikasi pada tindakan-tindakan inefisien, insentif yang tidak proporsional dan produktifitas yang rendah. Kondisi ini sebagai akibat dari mengecilnya utilitas dan *production possibility frontier*. Dalam sistem Sosialis Klasik, anggaphlah kepemilikan awal diubah oleh pemerintah dengan melakukan *land-reform*, di mana tanah milik A diambil sebagian untuk diberikan kepada B yang luas tanahnya lebih kecil dari pada A. Dari proses ini maka kemudian tanah yang dimiliki antara keduanya menjadi sama. Secara grafis dapat digambarkan dalam kurva berikut ini (Karim, 2002: 185):



Gambar 2

Pada gambar bagian atas menunjukkan bahwa hanya pada titik E kesejahteraan maksimal dapat terjadi dan kombinasi selain titik E tidak akan memberikan kesejahteraan yang maksimal. Sedangkan pada gambar bagian bawah menunjukkan bahwa titik L adalah dimana produksi optimal telah terjadi, dimana beras diproduksi sebesar  $R^{**}$  dan untuk gula sebanyak  $S^{**}$ .

Dari ilustrasi tersebut juga dapat dipahami bahwa beras dapat diproduksi sebesar  $OR^{**}$  adapun untuk gula sebesar  $OS^{**}$ . Segi empat  $OS^{**}LR^{**}$  adalah *Edgeworth Box*. Titik O merupakan titik origin bagi A, oleh karenanya ia akan memaksimalkan utilitasnya dengan mendorong  $U_a$  sejauh mungkin dari O menuju L. Sedangkan bagi B, ia akan berupaya mendorong  $U_b$  dari titik L untuk dapat mendekati titik O. Pada saat  $U_a$  dan  $U_b$  mengalami *tangency* maka saat itulah terjadi pareto optimal, sebagaimana yang digambarkan oleh garis harga (*price line*) KK. Karena *price line* ini merupakan gabungan antara garis anggaran A dan B maka slope MLM pada kurva *production possibility frontier* akan sama dengan KK.



Gambar bagian bawah juga menunjukkan bahwa ketika terjadi pareto optimal, jumlah barang yang diproduksi oleh A maupun B akan sama banyaknya dengan jumlah barang yang dikonsumsi. Jumlah beras yang mampu diproduksi sebesar  $OR^{**}$  sedangkan kapasitas gula yang dapat dihasilkan sebanyak  $OS^{**}$ . Konsumsi A terhadap beras sebesar  $ORa$  sedangkan B mengkonsumsi sebanyak  $RaR^{**}$ , sehingga total beras yang dikonsumsi sebanyak  $OR^{**}$ . Demikian halnya dengan gula yang dikonsumsi, di mana A mengkonsumsi sebesar  $OSa$  sedangkan B mengkonsumsi sebanyak  $SaS^{**}$ .

Dari penjelasan di atas maka diketahui bahwa distribusi pendapatan yang diperoleh oleh A maupun B dalam sistem ekonomi Sosialis Klasik adalah sama rata dan sama banyak sebagai imbas dari kesamaan dalam penguasaan faktor produksi/tanah. Keadilan mungkin terkesan dapat dicapai melalui mekanisme seperti ini, di mana setiap individu memperoleh 'kue' yang sama besar. Namun kondisi ini masih menyisakan pertanyaan, apakah *land-reform* di atas refleksi sebuah penerapan keadilan? Apakah keadilan pasti identik dengan sama rata dan 'sama banyak'? Apakah kesejahteraan sosial harus meniscayakan terbaginya 'kue' sama besar bagi setiap individu?

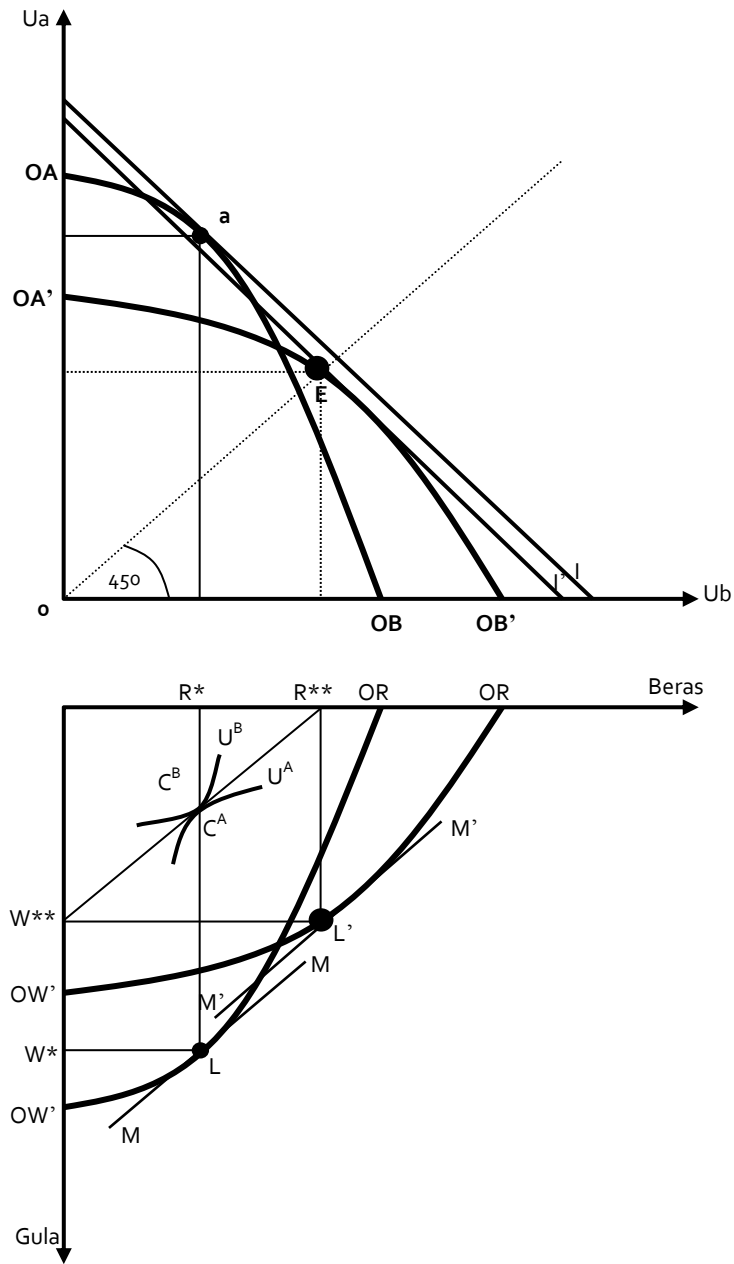
Dalam perspektif Ekonomi Islam, kesamarataan tidaklah identik dengan keadilan. Definisi adil itu sendiri adalah 'meletakkan segala sesuatu pada tempatnya':

وضع شئ في محله

Oleh karenanya, meskipun tujuan Sosialisme yaitu mencapai kesejahteraan secara bersama-sama hampir mirip dengan Ekonomi Islam, namun proses dan mekanismenya untuk meraih tujuan tersebut berlainan. Sosialisme umumnya menjadikan manusia ibarat mesin pekerja yang harus selalu menghasilkan output untuk kepentingan bersama. Akan tetapi hal ini justru menjadikan manusia sebagai faktor produksi yang kerap dieksploitasi, yang jelas bertentangan dengan tujuan produksi dalam Ekonomi Islam yaitu meningkatkan harkat dan martabat manusia itu sendiri.

Untuk lebih 'merumitkan' kesalahan yang ada pada sistem Sosialisme Klasik ini, perlu kita bandingkan dengan Kapitalis. Namun perbandingan ini tidak bertendensi bahwa sistem Kapitalis lebih bagus dan unggul dari pada Sosialis. Untuk lebih jelasnya kita perhatikan gambar berikut ini (Karim, 2002: 187):





Gambar 3  
Perbandingan sistem Kapitalis dan sistem Sosialis

Pilihan sistem ekonomi dari Kapitalis menjadi Sosialis, ternyata juga tidak membawa hasil yang lebih baik. Dari gambar di atas diandaikan bahwa sebagian tanah A diberikan kepada B, sehingga nampak bahwa besar  $OA'$  sama dengan  $OB'$ . Perubahan pada *production possibility frontier* juga terindikasi dari perubahan pada *utility possibility frontier*. Titik E merupakan persinggungan antara *utility possibility frontier* dengan garis anggaran iso-welfare, dan terlihat bahwa  $IT'$  ternyata lebih rendah dibandingkan dengan garis *iso-welfare* sebelumnya, di mana sebelum lahan dibagi kepada B. Garis anggaran yang baru ( $M'L'M'$ ) pun lebih rendah dari garis anggaran sebelumnya ( $MLM$ ).

Nampak bahwa penerapan sistem Sosialis juga menimbulkan efek negatif lainnya, seperti inefisiensi, rendahnya produktifitas kerja dan insentif kerja yang tidak proporsional. Hal ini sebagai akibat dari:

1. Kepemilikan A turun sehingga output yang ia hasilkan juga turun;
2. Output A mengalami penurunan karena hilangnya insentif dan motivasi karena ia diperlakukan secara diskriminatif terhadap B;
3. B juga kehilangan insentif untuk bekerja karena ia akan menghentikan kapasitas produksinya pada tingkatan tertentu. Hal ini disebabkan oleh turunnya demand dari A sehingga total demand juga akan berkurang.

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa pemerataan kekayaan dengan cara pembagian tanah secara tidak wajar merupakan *high cost economy* karena mengakibatkan inefisiensi dan tindakan diskriminatif yang dapat melahirkan gejala sosial.

### **Efisiensi Alokasi dan Distribusi: Menuju Ekonomi Islam yang Mensejahterakan**

Sebelumnya telah diuraikan bahwa pilihan antara sistem Kapitalis dan sistem Sosialis bukanlah pilihan yang tepat. Sistem Sosialis yang muncul belakangan sebagai upaya untuk 'melawan' Kapitalis, justru membawa permasalahan baru dalam hal efisiensi alokasi dan distribusi. Ekonomi Islam yang kini tengah dihidupkan setelah sekian lama terkubur dan nyaris menjadi 'fosil', diyakini oleh banyak pihak dapat menjadi *pan-acea* terhadap akutnya problem ekonomi kekinian di tengah cengkeraman Kapitalisme global yang kian hegemonik.

Imam Ali r.a. dalam *Nahjul Balaghah*-nya menyatakan bahwa '*jangan sampai kesejahteraan salah seorang di antara kamu meningkat, akan tetapi pada saat yang bersamaan kesejahteraan orang lain menurun.*' Dalam salah satu hadisnya, Rasulullah SAW juga bersabda:

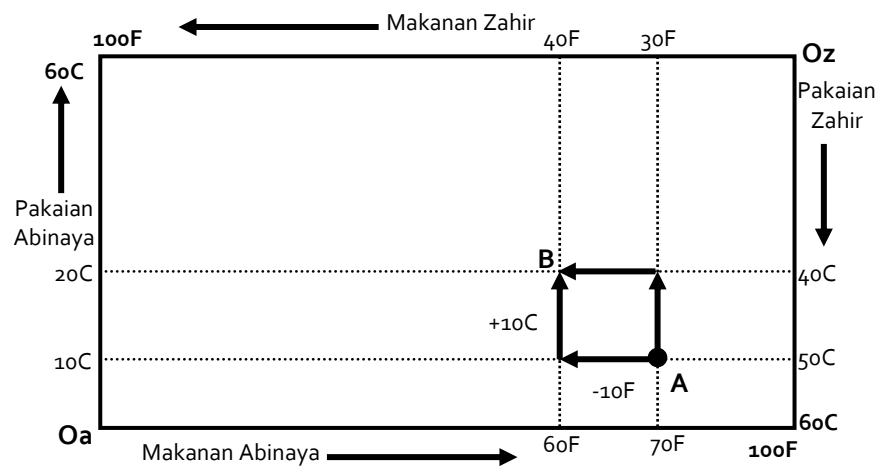
إِذَا طَبَخْتَ الْمَرْقَةَ فَأَكْثِرْ مَائِهَا وَتَعَاهِدْ جِيرَانَكَ

Hadis di atas menunjukkan bahwa kesejahteraan yang diraih oleh seseorang (dengan memasak gulai) harus juga dirasakan oleh pihak lain (dengan cara membagi kuah/gulai yang dimasak). Bandingkan dengan ekonomi konvensional yang mempunyai prinsip sebaliknya, yaitu *efficient allocation of goods*. Dalam prinsip ini dinyatakan bahwa alokasi barang dinyatakan efisien apabila tidak ada seorangpun dapat meningkatkan utilitasnya tanpa mengurangi utilitas orang lain.

Islam justru memerintahkan agar ketika seseorang mendapatkan kesejahteraan, maka ia juga harus meningkatkan kesejahteraan orang lain. Misalnya, Abinaya mempunyai 70 unit makanan dan 10 unit pakaian. Sedangkan Zahir mempunyai 30 unit makanan dan 50 unit pakaian. Karena keduanya saling membutuhkan untuk meraih kesejahteraan secara bersama-sama, maka mereka saling melakukan pertukaran guna meningkatkan kemaslahatan dan kemanfaatan bersama. Taruhlah pertukaran dilakukan seperti dalam tabel berikut:

Individu	Alokasi Awal	Pertukaran	Alokasi Akhir
Abinaya	70 Foods, 10 Cloths	-10 F, +10 C	60 F, 20 C
Zahir	30 F, 50 P	+10F, -10 C	40 M, 20 C

Keduanya akan selalu melakukan pertukaran sepanjang *marginal rate of substitution* (MRS) mereka berbeda. Secara grafis, diagram *Edgeworth Box* dapat digunakan seperti di bawah ini:



Gambar 4  
Kotak Edgeworth Box

Titik Oa adalah titik origin bagi Abinaya, di mana sumbu horizontal menunjukkan 70 unit makanan yang ia miliki sedangkan sumbu vertikal menunjukkan 10 unit pakaiannya. Adapun bagi Zahir, titik Oz adalah titik originnya di mana ia memiliki 50 unit pakaian pada sumbu vertikal dan 30 unit makanan pada sumbu horizontal. Bagi Abinaya, semakin jauh *utility function*-nya dari titik Oa maka semakin baik, demikian pula halnya bagi Zahir; jika *utility function*-nya semakin mendekati Oa maka semakin baik. Dalam kaca mata Islam,

keduanya selalu melakukan pertukaran selama saling memberi manfaat. Akan tetapi jika sudah tidak memberi manfaat dan maslahat, atau malah menimbulkan kerugian bagi pihak lain maka pertukaran tidak akan terjadi. Sekali lagi, keadilan menjadi kata kunci yang harus dipegang, dimana masing-masing pihak tidak boleh mendzalimi dan didzalimi dari sebuah usaha untuk meraih kesejahteraan. Dalam al-Qur'an dinyatakan bahwa :

لا تظلمون ولا تظلمون

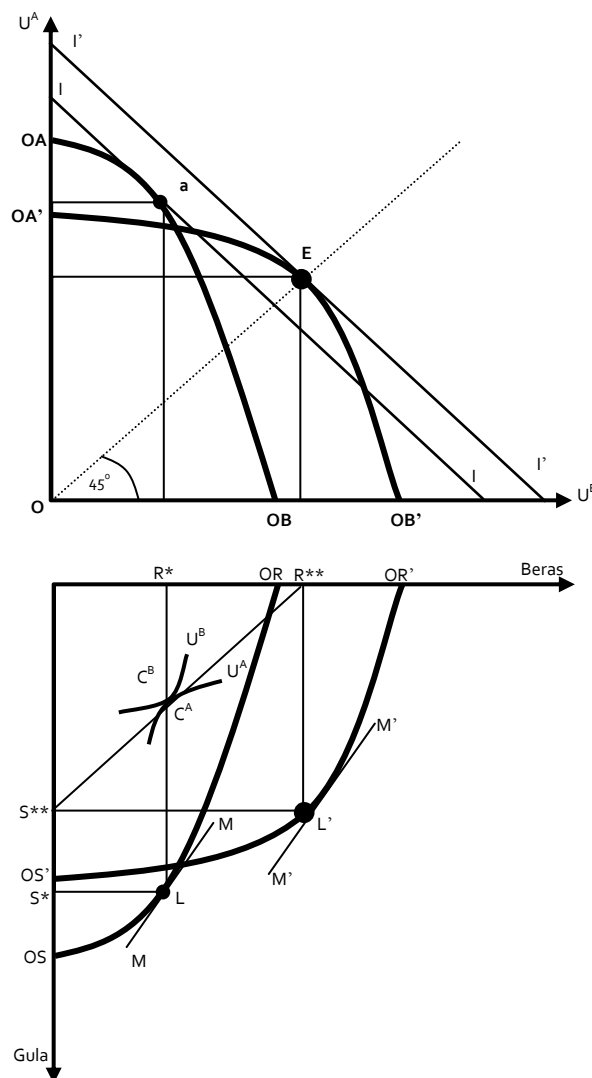
Namun yang perlu diperhatikan dari contoh Abinaya dan Zahir di atas adalah bahwa Islam tidak hanya sekedar membicarakan efisiensi dan keadilan semata, karena terperangkap dalam pola distribusi yang berkeadilan hanya membawa pada *zero sum game*. Dengan kata lain, kenaikan maslahat/manfaat Abinaya ternyata mengurangi manfaat/masalahat yang diterima oleh Zahir. Oleh karenanya Islam juga mendorong pada upaya *endowment* yaitu meningkatkan *production possibility frontier*. Dari hal ini maka dapat dikatakan bukan saja yang diupayakan adalah membagi 'kue' secara adil namun juga bagaimana menambah manfaat dan maslahat dengan cara 'memperbesar kue.'

Lalu bagaimanakah redistribusi kekayaan dan distribusi faktor-faktor produksi. Dalam skala mikro, redistribusi kekayaan dalam Ekonomi Islam dilakukan melalui hukum kewarisan (*faraidh*), kewajiban zakat, infaq dan beberapa transaksi *tabarru'* lainnya. Dari langkah ini maka para golongan miskin diharapkan tidak saja mendapatkan distribusi pendapatan, namun diharapkan dapat memiliki faktor-faktor produksi. Wacana yang dalam dua dasawarsa ini berkembang adalah pelaksanaan zakat produktif. Meskipun masih menimbulkan pro-kontra, namun setidaknya zakat produktif adalah sebuah langkah untuk meredistribusi faktor produksi, 'memperbesar kue' karena output yang semakin besar dan meningkatkan *aggregat demand* pula.

Seperti yang telah dijelaskan di bagian awal, bahwa sistem Kapitalis dan Sosialis dalam proses distribusi faktor produksi, dalam kasus ini adalah pembagian tanah, tidak mencerminkan keadilan. Lalu bagaimanakah dengan Ekonomi Islam? Kita ambil contoh dengan ilustrasi yang agak 'radikal' misalnya, dengan membagi tanah secara sama rata. Preseden yang dapat dijadikan landasan untuk mengambil contoh 'radikal' ini adalah ketika

sahabat Abu Bakar r.a. menginfakkan seluruh hartanya kepada negara dan keluarga; sahabat Umar bin Khatab r.a. menginfakkan separoh hartanya untuk negara, dan; sahabat Sa'ad bin Rabi' membagi hartanya 50%-50% dengan Abdurrahman bin Auf (Karim, 2002: 1983).

Dengan membagi tanah secara merata, apakah hal ini akan membawa kesejahteraan bagi masyarakat? Apakah langkah ini merupakan 'duplikasi' dari sistem Sosialis? Sebelumnya perlu ditegaskan sekali lagi bahwa distribusi dalam Islam melalui mekanisme yang menjunjung keadilan dan tidak bertentangan dengan *maqashid syari'ah* guna meraih kemaslahatan. Implikasinya, distribusi ini tidak akan merugikan orang lain; tidak membawa pada praktek *zero sum game*. Untuk lebih jelasnya kita perhatikan gambar berikut ini:

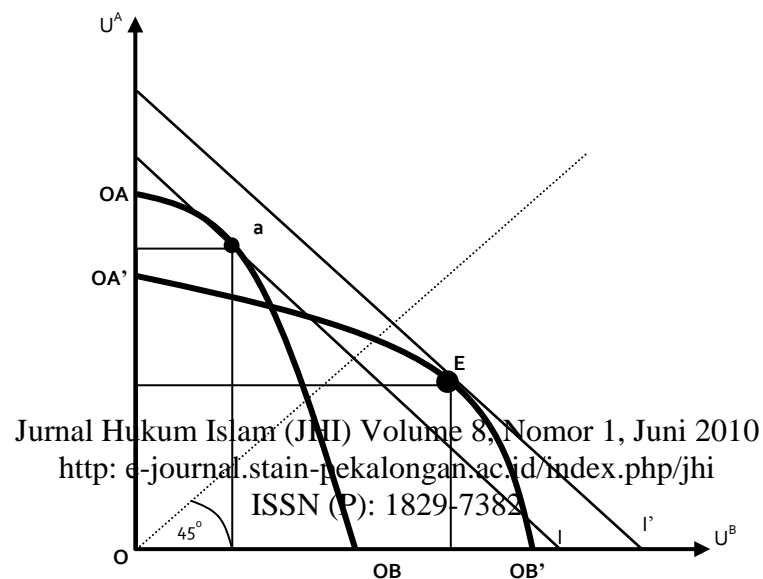


Gambar 6  
Perbandingan sistem Kapitalis dengan sistem Ekonomi Islam dalam kepemilikan yang sama



Distribusi ini ditunjukkan melalui *utility possibility frontier*  $OA'OB'$ . Perubahan juga tercermin dalam *production possibility frontier*  $OR'OS'$ . Maka titik E adalah persinggungan antara garis anggaran dengan *utility possibility frontier*. Selain itu garis anggaran yang baru yaitu  $P'P'$  lebih tinggi dibandingkan dengan  $II$ , yang berarti bahwa iso-welfare dalam Ekonomi Islam dengan cara membagi secara merata lebih superior dari pada iso-welfare dalam sistem Kapitalis. Naiknya iso-welfare dalam Ekonomi Islam ini juga dapat dilihat dari garis anggaran  $M'L'M'$  yang lebih tinggi dari garis anggaran sebelumnya, yaitu  $MLM$ .

Kondisi di atas juga terjadi meskipun distribusi kepemilikan tanah tidak dibagi secara merata namun tetap melalui mekanisme yang adil, maka kesejahteraan juga dapat dicapai secara bersama-sama. Perhatikan gambar di bawah ini:



Dengan memperhatikan pada uraian dan dua gambar terakhir yang ada maka dapat dikatakan bahwa dalam tiga sistem ekonomi, yaitu Kapitalis, Sosialis dan Ekonomi Islam,

baik dengan kepemilikan tanah yang sama rata maupun berbeda, jelas bahwa Ekonomi Islam dapat mencapai *iso-welfare* yang tinggi dan efisiensi secara bersamaan. Kepuasan yang dirasakan oleh setiap agen Ekonomi Islam tidak akan cepat berkurang karena adanya nilai masalah yang selalu ia upayakan secara terus menerus melalui berkah yang ada dalam setiap aktivitasnya.

### **Penutup**

Kepemilikan faktor-faktor produksi perlu didistribusikan secara adil dan proporsional, sehingga setiap agen ekonomi mampu berpartisipasi secara maksimal dalam proses produksi. Jika seorang agen mempunyai faktor produksi yang signifikan maka ia juga akan menghasilkan output maksimal yang dengan sendirinya akan menaikkan pendapatannya. *Dus*, distribusi tidak saja hanya berkuat pada distribusi pendapatan namun juga faktor-faktor produksi.

Kepemilikan faktor produksi dalam Kapitalis ternyata hanya semakin memperlebar jarak antara si kaya dan si miskin sebagai imbas dari liberalisasi kepemilikan individu dan berkuasanya 'kapital' di antara faktor produksi yang lain. Demikian halnya Sosialis yang 'terkesan' adil namun kenyataannya juga menimbulkan masalah baru dalam ekonomi, seperti inefisiensi dan rendahnya produktifitas. Kesemuanya ini berangkat dari satu akar, yaitu keadilan. Sama rata atau tidak, selama itu tidak berpegang pada keadilan maka persoalan dan problem ekonomi akan senantiasa mengemuka.

Ekonomi Islam yang berpangku pada *maqashid syari'ah* untuk membawa kemaslahatan, selalu menitikberatkan kepada mekanisme yang adil dan sesuai dengan syari'ah. Uraian dalam pembahasan di atas menunjukkan superioritas Ekonomi Islam jika dibanding sistem ekonomi lainnya dalam hal pendistribusiann faktor produksi, efisiensi alokasi dan sumber daya. *Keyword*-nya adalah keadilan. Jika seluruh agen ekonomi telah memperoleh hak dan kewajibannya secara proporsioanal dan melalui mekanisme yang adil, maka seluruh individu akan secara bersama-sama memperoleh kesejahteraan.

### **Daftar Pustaka**

- Karim, Adiwarmman. 2002. *Ekonomi Mikro Islami*, Jakarta: IIT..
- Khan, M. Fahim dan Nur Muhammad Ghifari. 1992. "Shatibi's Objectives of Shari'ah and Some Implications for Consumer Theory," dalam AbulHasan M. Sadeq dan Aidit Ghazali (ed.), *Reading in Islamic Economic Thought*, Malaysia: Longman Malaysia.
- Khan, Muhammad Akram. 1994. *An Introduction to Islamic Economics*, Islamabad: IIT.
- Nasution, Mustafa Edwin (dkk.). 2006. *Pengenalan Eksklusif Ekonomi Islam*, Jakarta: Prenada Media.
- P3EI. 2007. *Text Book Ekonomi Islam*, Yogyakarta: P3EI UII.
- Pindyck, Robert & Daniel Rubinfeld, 1995. *Microeconomics*, New Jersey: Prentice Hall.

